

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Abimanyu, Anggito, dkk, *Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep, dan Implikasi)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andriyan, Dody Nur, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2008.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Atmaja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dan Perspektif Hukum Dan Kritik*, Edisi Ke-3 Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta 2011.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- H, Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* Yogyakarta, Rake Sarakin, Yogyakarta, 2003.
- Hadjon, Philipus M., *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2005.

- Kalsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Perkasa, Bandung, 2006.
- Keban, Y.T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Edisi 2, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2008.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Khairrunisa, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008.
- M, Subagio, *Hukum Keuangan Negara RI*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Manan, Bagir, *Politik Per Undang-Undang Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pertamina Retail, "ANNUAL REPORT 2021," no.11 tahun 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo, Depok, 2011.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Kencana*, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.

- Soeriaatmadja, Arifin, *Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2010.
- Sudrajat, Tedi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Sulaiman, Alfin, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Very, Torganda Tampubolon, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Manfaat Terhadap Penggunaan Aplikasi Mobile Pertamina Go" (Survey Pada Pengguna Aplikasi Mobile Pertamina GO Di Kota Semarang)," Undergraduate Thesis, Faculty of Social and Political Sciences, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Weihrich, Heinz and Haroid Koontz, *Management A. Global Perspective Tent Edition*, New York: McGraw-Hill, Inc., 1993.
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak," 2013.
- BPH Migas Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi No. 17 Tahun 2019_TTD (Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu).pdf" n.d.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/Pmk.05/2012 Tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-Lain

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Pasal 2 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Pasal 1 Angka 1, Undang Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara.
- Pasal 1 Angka 1. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Pasal 1, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- Pasal 16 Ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pasal 17, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Khusus Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Pasal 23, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 24-26, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/Pmk.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Pasal 27, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Pasal 3, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Pasal 30, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan dalam Undang-Undang APBN.
- Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Pasal 55, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Pasal 6, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbit Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- Pasal 6, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/Pmk.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Pasal 8 dan 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara.
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Penjelasan Undang Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02.2009 Tentang Tata Cara Peyediaan, Penghitung Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan minyak Dan Gas Bumi Negara,” no. 1 (1971).
- Presiden RI, “Peraturan Presiden RI No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,” 2014.
- Republik indonesia, Penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN Nomor Tahun 2003, TLN Nomor 4286, disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003.
- Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 55/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2019 Tentang Penyediaan dan

Pendistribusian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Oleh PT. Pertamina (Persero) Tahun 2020.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Pasal 1 angka 7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Jurnal Ilmiah:

Abidin, M. Zainul, “Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 2, Juni 2013.

Arsyad, Aprillani, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020.

Asikin, Zainal, “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dalam BUMN”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4 No. 2, Desember 2019.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 No 1, 2020.

Eldira, Elda, “Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara”, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 2, Februari 2021.

Elviandri, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 2, 2019.

Juliani, Henny, “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 45 No. 4, Oktober 2016.

Kodai, Dince Aisa, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia”, Jurnal Evidence Of Law, Vol. 2 No. 2, Agustus 2023.

KPK, Perpustakaan, “Tafsir Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2, Juni 2008.

MT, Gerry, “Paradigma Baru Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara”, Jurnal Mandalanursa Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5 No. 2, 2021.

Munawar, Dingtji, “Pmemahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN,” *ACADEMIA Accelerating the world's research*, 2013, hlm. 1-23

Mustamu, Danila Devina dan Yuliani Rachma Putri, “Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi MyPertamina Pertamina Di Masyarakat Kota Bandung,” *E-Proceeding of OManagement*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Nasution, Rafiq Rahadi, “Implementasi UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina dan pandangannya menurut teori kemaslahatan”, *Jurnal II CET*, Vol. 9 No. I, 2023.

Suastama, Ida Bagus Radendra, “Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Migas Dan Ketenagakerjaan”, *Mimbar Hukum*, Vol.2 No.4 Juni 2012.

Wati, Dwi Ananda Fajar, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero”, *Jurnal Badamai Law*, Vol 7 No 1, April 2016.

Laporan Penelitian/ Skripsi/Tesis/Disertasi:

Aminudin, *Privatisasi BUMN Persero, Disertasi*, PPS UNAIR, Surabaya, 1999.

Subairi, Imam, *Implentasi Sistem Pembelian BBM Melalui Aplikasi MyPertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance, Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. 2023.

Media Online:

Adi, Agus Cahyono, 2024, “Masyarakat Mampu Lebih Banyak Menikmati BBM Subsidi”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/masyarakat-mampu-lebih-banyak-nikmati-bbm-subsidi>, diakses pada 4 Maret 2024

Ahdiat, Adi, “Data Boks Anggaran Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Indonesia (2017-2024)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/22/pemerintah-naikkan-anggaran-subsidi-bbm-pada-2024> , diakses pada 2 Februari 2024.

Andrean W. Finaka, “Beda Fasilitas Warna SPBU”, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-fasilitas-sesuai-warna-spbu> di akses pada 23 Oktober 2023.

Auli, Renata Crista, 2022, “Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/#>, diakses pada 1 April 2024.

- Devina, “Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi MyPertamina Terhadap Keputusan Pembelian Bahan Bakar Pertamina Di Masyarakat Kota Bandung”. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/151722/pengaruh-promosi-melalui-aplikasi-mypertamina-terhadap-keputusan-pembelian-bahan-bakar-pertamax-di-masyarakat-kota-bandung.html>. Diakses pada 24 Oktober 2023.
- Farisa, Fitria Chusna, 3 September 2022, “Harga BBM Naik, Jokowi: 70 Persen Subsidi Justru Dinikmati Kelompok Mampu Pemilik Mobil”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/03/14561231/harga-bbm-naik-jokowi-70-persen-subsidi-justeru-dinikmati-kelompok-mampu>. diakses pada 9 September 2022.
- Finance, Detik, “Anggaran Subsidi BBM Bisa Bengkak 700 T Jokowi Dari Mana Uangnya”, <https://finance.detik.com/energi/d-6287205/anggaran-subsidi-bbm-bisa-bengkak-jadi-rp-700-t-jokowi-dari-mana-uangnya> , diakses pada 16 Desember 2023.
- Google Play Store, “Aplikasi MyPertamina”, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dafturn.mypertamina&hl=id&pli=1> Diakses pada 23 oktober 2023.
- Gunung Jati, Universitas, November 2019, “Keuangan Negara”, <https://learning.ugj.ac.id/mod/resource/view.php?id=5743> diakses 20 Maret 2023.
- Humas, 2015, “Inilah Perpres Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM”, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-tentang-penyediaan-pendistribusian-dan-harga-jual-eceran-bbm/>, Diakses pada 3 April 2024.
- Indonesia Investments, 2020, “Pertamina”, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>, diakses pada 2 Maret 2024.
- Indonesia, CNBC, “Penyaluran BBM Peralite 2023 Ternyata Bisa Ditekan di Bawah Kuota”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108181306-4-503880/penyaluran-bbm-peralite-2023-ternyata-bisa-ditekan-di-bawah-kuota> , diakses pada 3 Februari 2024.
- Indonesia, CNBC, “subsidi energi 2023 masih jumbo capai Rp 210,6 Triliun”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220816144130-4-364232/subsidi-energi-2023-masih-jumbo-capai-rp2106-triliun/amp> diakses pada 16 Desember 2023.
- Indonsia, CNN, “Subsidi BBM Sudah Terpakai Rp61, 4 T Per Agustus 2023”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230920204438-532-1001668/subsidi-bbm-sudah-terpakai-rp61-4-t-per-agustus-2023/amp> , diakses pada 2 Februari 2023.
- Instagram MyPertamina, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

- Kemendagri, Sekertariat Dukcapil, 24 Februari 2022, “273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri”, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> diakses 8 Agustus 2022.
- Masito, Siti, “Anggaran Subsidi dan Kompensasi BBM Tahun 2023 Sebesar Rp 339,6 Triliun”, <https://amp.kontan.co.id/news/anggaran-subsidi-dan-kompensasi-bbm-tahun-2023-sebesar-rp-3396-triliun>, diakses pada 2 Februari 2024.
- Migas, BPH, “Surat Rekomendasi Pembelian BBM: Mekanisme Pendistribusian Solar dan Peralite Tepat Sasaran”, <https://www.bphmigas.go.id/surat-rekomendasi-pembelian-bbm-mekanisme-pendistribusian-solar-dan-peralite-tepat-sasara/>, diakses pada 11 April 2024.
- MyPertamina, “Cara Mendapatkan Barcode di Aplikasi MyPertamina”, <https://www.mypertamina.id> diakses pada 23 Oktober 2023
- MyPertamina, “Fitur-Fitur Pada Aplikasi MyPertamina”, <https://mypertamina.id> diakses pada 23 Oktober 2023.
- MyPertamina, “Jenis Bahan Bakar Minyak”, <https://www.mypertamina.id>, diakses pada 23 Oktober 2023.
- MyPertamina, Subsidi Tepat, “Ketentuan Pengguna BBM Bersubsidi”, <https://subsidi-tepat.mypertamina.id/syarat-ketentuan>, diakses pada 5 September 2024.
- MyPertamina, Subsidi Tepat, “Pendaftaran Kendaraan Subsidi Tepat Melalui Website Subsidi Tepat MyPertamina”, <https://subsidi-tepat.mypertamina.id/> diakses pada 24 Oktober 2023
- MyPertamina”, <https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2024
- Nabilla, Farah, 28 Juni 2022, “Ini Tujuan Pertamina Wajibkan Konsumen Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina”, <https://www.suara.com/news/2022/06/28/135305/ini-tujuan-pertamina-wajibkan-konsumen-beli-bbm-pakai-aplikasi-mypertamina?page=2>, Diakses pada 8 Agustus 2022.
- Niaga, Pertamina Patra, 2023, “Pertamina Tindak Tegas Penyelewengan Penjualan BBM Bersubsidi”, <https://pertainapatraniaga.com/berita/pertamina-tindak-tegas-penyelewengan-penjualan-bbm-bersubsidi/>, diakses pada 3 April 2024.
- NISP, Redaksi OCBC, “Subsidi Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat Dan Dampaknya”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah>, Diakses Pada 21 Oktober 2023.

- Online, Tim Hukum, “Jenis-Jenis Subsidi Pemerintah dan Tujuannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-subsidi-dan-tujuannya-lt62537cf639606/#!>, diakses pada 2 Juli 2024.
- Online, Tim Hukum, 2022, “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/#!>, diakses pada 1 April 2024.
- Permatasari, Erizka, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>, Diakses pada 8 Mei 2024.
- Pertamina, “Pertamina Patra Niaga”, <https://pertainapatraniaga.com> diakses pada 23 Oktober 2023.
- Pertamina, “Sejarah pertamina”, <https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.
- Pertamina, “Sekilas pertamina”, <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami> diakses pada 23 Oktober 2023.
- Pertamina, 2016, “Ketentuan Penggunaan BBM Bersubsidi”, <https://subsidiempat.mypertamina.id/syarat-ketentuan>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2023.
- Pertamina, t.t., “Apa Itu MyPertamina”, <https://mypertamina.id/about-us>, diakses pada 14 Januari 2024.
- PT. Pertamina (Persero), “sejarah Pertamina”, <http://www.pertamina.com>, diakses pada 5 Maret 2024.
- Qothrunnada, Kholida, 23 Mei 2022, “Jejak e-Commerce di Indonesia Waktu ke Waktu Berawal dari Kaskus”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6091087/jejak-e-commerce-di-indonesia-waktu-ke-waktu-berawal-dari-kaskus>, diakses 8 Agustus 2022.
- R, Dhany, R., 2013, “Ini Alasan Indonesia Masih Impor BBM 500.000 Barel/Hari”, <http://finance.detik.com/read/2012/08/03/122329/1982326/1034/inialasan-indonesia-masih-imporbbs-500000-barel-hari>, diakses pada 3 agustus 2023.
- Retail, Pertamina, “Riwayat singkat perusahaan PT. Pertamina”, <https://pertainaretail.com/riwayat-singkat-perusahaan/> diakses pada 23 Oktober 2023.
- Ridwan, Dany M., “BBM Bersubsidi”, <https://www.caroline.id/blog/article/bbm-bersubsidi-adalah> , diakses pada 21 oktober 2023.
- Saidi, Muhammad Djafar, Hukum Keuangan Negara, RajaGrafindo, Depok, 2011, hlm. 34.

- Santoso, Fadjar Djoko, 2023, "Gencar Sosialisasikan Program Subsidi Tepat, Pertamina Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder", <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/gencar-sosialisasikan-program-subsidi-tepat-pertamina-tingkatkan-sinergi-dengan-stakeholder>, diakses pada 14 Januari 2024.
- Setiawan, Ebta, "Arti Kata Subsidi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Daring)", <https://kbbi.web.id/subsidi>, diakses pada 2 Juli 2024.
- Setiawan, Ebta, 2012, "Arti Kata Administrasi", <https://kbbi.web.id/administrasi>, diakses pada 14 Januari 2024.
- Setiawan, Ebta, 2012, "Arti Kata Tanggung Jawab", <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 14 Januari 2024.
- Setiawan, Verda Nano, 28 Mei 2024, "Baru 2 Bulan, Kuota Solar dan Peralite Sudah Jebol!", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220330135244-4-327262/baru-2-bulan-kuota-solar-peralite-sudah-jebol>. diakses pada 9 September 2022.
- Soderi (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan KEMENKEU), "Jenis Belanja Subsidi Pada APBN", <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/jenis-belanja-subsidi-pada-apbn-7598d2d6/detail/>, diakses pada 2 Juli 2024.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lab Ilmu Pemerintahan, Oktober 2022, "Welfare state, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan", <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/> diakses 31 Mei 2024.
- Wahyudi, Amin, 5 Agustus 2022, "Banyak Yang Salah Sasaran, BPH Migas Butuh Bantuan Untuk Pengawasan 15,1 Kilo Liter BBM Bersubsidi", <https://serayunews.com/banyak-yang-salah-sasaran-bph-migas-butuh-bantuan-untuk-pengawasan-151-kilo-liter-bbm-bersubsidi/>, diakses pada 8 Agustus 2022.
- Webster, Merriam-, 2020, "Welfare", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/welfare> diakses 31 Mei 2024.